



Selain melenceng dari khitah BPR sebagai *community bank*, keengganan BPR menyalurkan dana untuk kegiatan produktif UMKM karena persepsi risiko yang tinggi ternyata tidak senantiasa sejalan dengan perhitungan risiko keuangan yang sesungguhnya.

Ali Mutasowifin
Dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

Antara Khitah & Kiprah BPR

Dalam diskursus tentang perbankan, biasanya kita lebih terpaku kepada bank umum dan mengabaikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Data yang ada menunjukkan keberadaan BPR tidak dapat diremehkan. Pada Agustus 2014, misalnya, jumlah BPR mencapai 1.635, dengan jumlah nasabah 13,4 juta rekening dan total aset mencapai Rp82,6 triliun. Peran BPR juga terlihat dalam intermediasi keuangan, khususnya kepada golongan ekonomi lemah. Pada Agustus 2014, jumlah kredit konvensional yang disalurkan mencapai Rp57,6 triliun sedangkan sumber dananya berjumlah Rp68,08 triliun.

Berlainan dengan Bank Umum, BPR lebih fokus melayani kebutuhan masyarakat kecil, seperti petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan yang belum dijangkau oleh bank umum serta sebagai upaya mewujudkan pemerataan layanan perbankan, kesempatan berusaha dan pendapatan.

Namun, berlandaskan data yang ada, banyak BPR yang melenceng dari *raison d'être*-nya, yakni melayani kebutuhan pendanaan untuk kegiatan produktif usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Jika kita tilik pangsa kredit BPR berdasarkan jenis penggunaannya, terlihat bahwa porsi kredit konsumsi terus menunjukkan peningkatan, sementara kredit produktif malah terus menurun.

Kredit konsumsi memang tidak bisa dihilangkan sama sekali dari bisnis BPR karena beberapa kebutuhan mendesak menggunakan

pembiayaan ini. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), kredit konsumtif yang disalurkan oleh BPR mencapai Rp19,53 triliun, atau sekitar 47,15% dari seluruh portofolio pembiayaan yang mencapai Rp41,42 triliun, disusul kredit modal kerja yang berjumlah Rp19,5 triliun (47,08%), sedangkan kredit investasi hanya Rp2,39 triliun (5,77%).

Jika dibandingkan data 2008, kecenderungan yang terjadi memang mengkhawatirkan, karena saat itu kredit konsumtif baru 41,75%, kredit modal kerja masih 51,02%, dan kredit investasi 7,24%.

PERTIMBANGAN RISIKO

Berdasarkan data penelitian yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan para pengurus beberapa BPR di berbagai wilayah di Tanah Air yang portofolio kreditnya sebagian besar disalurkan untuk kredit konsumtif, diperoleh kesimpulan bahwa strategi itu dipilih karena pertimbangan risiko yang mereka nilai lebih rendah serta *return* yang tinggi.

Kredit konsumtif biasanya disalurkan BPR kepada para pegawai, baik di instansi pemerintah atau swasta, yang pengembaliannya diangsur dengan potong gaji setiap bulan. Karena ada jaminan potong gaji, banyak BPR lebih menyukai cara ini untuk menekan *non performing loan* (NPL).

Pandangan semacam itu kemudian juga mengenyampingkan penyaluran dana ke usaha-usaha produktif yang dinilai lebih berisiko. Padahal, penyaluran kredit kepada usaha-usaha produktif diharapkan

dapat menjadi penopang kehidupan masyarakat di sekeliling BPR dan menghasilkan *multiplier effect* yang lebih besar dalam meningkatkan perekonomian regional.

Selain melenceng dari khitah BPR sebagai *community bank*, keengganan BPR menyalurkan dana untuk kegiatan produktif UMKM karena persepsi risiko yang tinggi ternyata tidak senantiasa sejalan dengan perhitungan risiko keuangan yang sesungguhnya.

Untuk menelaah lebih lanjut, penulis membandingkan dua BPR dengan kondisi yang mirip dalam banyak aspek, tapi portofolio kredit yang disalurkan secara ekstrem bertolak belakang.

Pertama, BPR milik pemerintah daerah yang portofolio kredit yang disalurkan hampir seluruhnya untuk kredit konsumtif. Sementara itu, BPR *kedua*, dimiliki oleh swasta, yang sebagian besar portofolio kreditnya disalurkan untuk kredit

produktif.

Hasilnya ternyata berbeda dengan yang semula diperkirakan. Dengan menggunakan analisis Z-Score, yang biasa digunakan untuk memprediksi kebangkrutan suatu usaha, selama tiga tahun berturut-turut BPR pertama memperoleh *score* 1.489, 1.293, dan 1.061.

Makna angka-angka tersebut adalah, pada dua tahun pertama, BPR tersebut berada pada posisi *grey area*, sedangkan pada tahun ketiga BPR tersebut mengalami malah masalah keuangan serius dan berpotensi untuk

bangkrut (*bankrupt company*).

Sementara itu BPR kedua, yang dianggap lebih berisiko karena menyalurkan lebih banyak dananya untuk usaha produktif UMKM, selama kurun waktu tiga tahun yang sama ternyata memperoleh *score* 3.688, 3.255, dan 2.988, yang berarti bahwa BPR itu tidak mengalami masalah dengan kondisi keuangannya (*non-bankrupt company*).

Tentu saja, analisis Z-Score ini hanyalah satu petunjuk kecil yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan penjelasan kepada para pengurus BPR agar tidak keliru mempersepsikan risiko keuangan yang dihadapi BPR, yang pada akhirnya berujung kepada pilihan strategi yang salah.

Jika kesalahan ini tidak disadari dan kemudian dianggap praktik yang benar serta diikuti oleh banyak BPR, tentu akan membahayakan industri BPR secara keseluruhan.

Fenomena ini perlu diwaspadai serta dipagari dengan beragam regulasi untuk mencegah BPR melalakan khitahnya sebagai *community bank* dengan memilih jalan 'mudah' dan 'murah' dalam menyalurkan dana pihak ketiga, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat kecil yang membutuhkannya. ■

